

# **Ketahanan dan Krisis Pangan dalam Perspektif Malthus, Depedensi dan Gender (*Women in Development*)**

**Karen Winsdel Dinly Pieris**

*Departemen Hubungan Internasional  
Universitas Airlangga*

## **ABSTRAK**

*Artikel ini membahas mengenai Ketahanan dan Krisis Pangan. Dalam memahaminya, penulis menggunakan tiga perspektif yaitu perspektif Malthusian, dependensi, dan gender (perempuan dalam pembangunan). Perspektif Malthusian melihat bahwa untuk mengatasi krisis pangan dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Teori dependensi berasumsi bahwa dalam mengatasi krisis pangan diperlukan pemutusan ketergantungan pada hegemoni pusat terhadap negara periphery. Perspektif gender melihat bahwa kurangnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi faktor dalam terjadinya krisis pangan.*

**Kata-kata kunci:** ketahanan pangan, krisis pangan, perspektif Malthusian, dependensi, dan *women in development*

## **ABSTRACT**

*The definition of food security has some distinctions when it is fit within the context of the time, place, and decision-making process. There have been a few of conceptual and theoretical development on definition of it. In order to understand the phenomenon, the author is going to use three perspectives, which are Malthusian perspective, Dependencies and Gender (women in development). Malthusian perspective sees that to solve the food crisis is by pushing the growth rate. Dependencies theory assumes that in solving the food crisis, the periphery state needs to cut the dependencies to the core states. Gender perspective sees that lack of women involvement in development is the factor creating food crisis.*

**Keywords:** food security, Malthusian perspective, dependency perspective, gender approach on food crisis.

## Ketahanan Pangan dan Krisis Finansial Global

Dari perspektif sejarah istilah ketahanan pangan (*food security*) muncul karena adanya krisis pangan dan kelaparan (Reutlinger 1982 dalam Maxwell & Frankenberger 1992). Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara-negara berkembang dari krisis produksi dan krisis suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan. Definisi dari PBB lantas dirumuskan sebagai berikut:

Food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster

(Syarief, et al. 1999).

Selanjutnya definisi tersebut disempurnakan pada International Conference of Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB dengan menyatakan bahwa tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Banyak definisi tentang ketahanan pangan, sering samar-samar dan kadang-kadang antara satu definisi dengan definisi yang lain kontradiktif (Barichello 2000). Maxwell (2003), mencoba menelusuri perubahan-perubahan definisi tentang ketahanan pangan sejak World Food Summit tahun 1974 hingga pertengahan dekade 1990-an. Menurutnya, perubahan yang terjadi pada konsep ketahanan pangan, dapat terjadi pada level global, nasional, skala rumah tangga, dan bahkan individu. Perkembangannya terlihat dari perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) hingga pada perspektif penghidupan (*livelihood perspective*) dan dari indikator-indikator objektif ke persepsi yang lebih subjektif (Maxwell 2003). Maxwell & Slatter (2003) pun turut menganalisis diskursus mengenai definisi ketahanan pangan tersebut. Mereka menemukan bahwa ketahanan pangan berubah sedemikian cepatnya dari fokus terhadap ketersediaan-penyediaan (*supply and availability*) ke perspektif hak dan akses (*entitlements*). Sejak tahun 1980-an, diskursus global ketahanan pangan didominasi oleh hak atas pangan (*food entitlements*), risiko dan kerentanan (*vulnerability*) (Maxwell & Slater 2003; Boudreau & Dilley 2001).

Fakta internasional menunjukkan bahwa banyak negara yang mampu mencapai swasembada pangan tetapi mengalami insekuritas pangan. Ini jelas terlihat ketika Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984, justru jumlah bantuan pangan Amerika Serikat (AS) pada waktu yang sama adalah rata-rata tiga puluh kali lebih besar dibandingkan era tahun 1990-an, ketika Indonesia tidak lagi memegang predikat swasembada pangan nasional. Tampak jelas, swasembada pangan tidak serta merta menjawab persoalan distribusi pangan dan akses atas pangan secara adil dan merata (Stevens et. al. 2000). Krisis adalah situasi yang merupakan titik balik (*turning point*) yang dapat membuat suatu keadaan bertambah baik atau bertambah buruk. Jika dipandang dengan kacamata bisnis, maka suatu krisis dapat menimbulkan beberapa hal seperti penambahan intensitas permasalahan. Masalah dapat menyebar menjadi konsumsi publik melalui media informasi.

Jika tidak ditanggulangi secara serius dan efektif, maka masalah akan terus berkelanjutan. Secara normatif, negara-negara yang ada saling menjalin hubungan satu sama lain, guna terciptanya perdamaian dan saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini negara-negara saling tergantung sama lain. Pendekatan ketergantungan merupakan keadaan saling ketegantungan satu sama lain. Krisis pangan dapat dikaitkan dengan teori domino. Suatu keadaan jika terjadi krisis di satu negara, maka juga akan berimbas pada negara lainnya. Fenomena krisis yang terjadi ke hampir seluruh pelosok dunia inilah yang kemudian dikenal dengan istilah krisis global. Interkoneksi sistem bisnis global yang saling terkait, menimbulkan efek domino.

Seperti krisis yang berbasis di Amerika Serikat, dengan cepat dan mudah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Krisis keuangan yang berawal dari krisis *subprime mortgage* (kredit perumahan) telah merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS. Pemain-pemain utama Wall Street berguguran, termasuk Lehman Brothers dan Washington Mutual, dua bank terbesar di Amerika Serikat. Di kawasan Asia Pasifik terdapat 62% penderita kurang gizi dari jumlah keseluruhan di dunia. Studi Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP) mengidentifikasi 25 negara yang mengalami ancaman krisis pangan. Bahkan di negara negara yang tampak maju, pendapatan rata-rata nasional bisa jadi menutupi perbedaan di

antara kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah negara-negara di Asia Pasifik, berat tubuh anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan berada dibawah normal dibandingkan berat tubuh anak-anak yang tinggal di perkotaan.

Kemiskinan adalah penyebab utama bahaya ancaman pangan. Penduduk dengan pendapatan rendah tidak mampu membeli makanan bergizi. Ketiadaan akses ke ladang juga menghalangi usaha rakyat miskin untuk menanam makanan sendiri. Penyebab lain dari ancaman pangan amat beragam, dari turunnya jumlah pendapatan panen hingga dampak kenaikan harga minyak. Proteksi kebijakan perdagangan juga mengakibatkan kenaikan harga makanan. Untuk mencukupi kebutuhan pangan, banyak negara di Asia Pasifik terpaksa harus mengimpor dari negara lain. Ironisnya, agrikultur juga merupakan salah satu pemicu krisis pangan. Praktik pertanian seperti penggunaan pestisida dan herbisida tanpa perhitungan yang benar mengakibatkan rusaknya kesuburan tanah. Perubahan iklim juga berakibat fatal pada hasil agrikultur.

### **Krisis Pangan dan Perspektif Malthus**

Istilah krisis selalu dikaitkan dengan tidak seimbangnya antara *supply* (ketersediaan) dengan *demand* (kebutuhan), yaitu ketika angka kebutuhan lebih tinggi dari ketersediaan, maka terjadilah krisis. Kekhawatiran terhadap krisis pangan pertama dinyatakan oleh Thomas Robert Malthus (1766–1834), bahwa laju pertumbuhan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasar deret hitung. Deret ukur dalam pemahaman Malthus diartikan sebagai terjadinya peningkatan berdasar kelipatan yakni: 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Sedangkan deret hitung menjelaskan bahwa peningkatan terjadi berdasar penambahan tetap dengan angka variabel penambah 1, yakni 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa teori Malthus mengingatkan bahwa secara alamiah generasi yang akan datang akan memiliki permasalahan yang lebih kompleks berkaitan dengan ketersediaan pangan, dibanding dengan generasi sebelumnya. Solusi yang ditawarkan adalah bagaimana menekan laju pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana (KB) berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk di banyak negara seperti Tiongkok dan Indonesia, namun tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan.

Malthus (1766) juga menekankan bagaimana meningkatkan produksi pangan untuk menyikapi persoalan potensi krisis pangan. Kecemasan Malthus (1766) kemudian dijadikan dasar alasan oleh Dr. Norman Bourlag (1995) untuk segera merealisasikan gagasannya yang populer dengan sebutan Revolusi Hijau. Krisis pangan ini, menurut klaim organisasi pangan dan pertanian PBB, Food Association Organization (FAO), telah diprediksi dan dikeluhkan petinggi FAO sejak dekade 1980-an (fao.org 1995). Olivier de Schutter (Schutter, dalam Zulkifli 2014) ketua FAO, mengungkapkan bahwa stok pangan global tahun 2014 yang lebih rendah lima persen dibanding tahun lalu, atau terendah dalam 20 tahun terakhir, merupakan hibrida dari kesalahan kebijakan yang dicanangkan dalam 20 tahun terakhir. Pengambil kebijakan yang dimaksud adalah negara-negara berkembang, yang dianjurkan Bank Dunia dan IMF, untuk melakukan liberalisasi pertanian. Selain mendorong komersialisasi dan keterlibatan investor besar di sektor pertanian, dua lembaga itu juga mendesak negara-negara berkembang untuk menghasilkan komoditas berorientasi ekspor.

Dengan portofolio kebijakan ini, banyak negara kemudian mengabaikan produksi pangan berbasis kebutuhan rakyat. Termasuk mengecilkan pentingnya investasi di sektor pertanian yang tidak berorientasi ekspor. Kritik paling keras tertuju pada mekanisme liberalisasi, dengan harga-harga pangan mutlak ditentukan oleh mekanisme pasar. Kebutuhan yang tinggi dan keterbatasan stok, membuat spekulasi di pasar komoditas mampu mempermainkan harga. Para spekulasi, dan pemain-pemain besar di sektor pertanian meraup untung berlebih dari penderitaan masyarakat global. Dari perspektif Malthusian (1766), pasar bebas memberi jalan bagi keserakahan sektor swasta. Melalui tuntutan persaingan bebas yang kompetitif, kemurahan hati dan rasa peduli haruslah diminimalkan. Prinsip dasarnya adalah ambillah sebanyak-banyaknya, demi keunggulan sebagian ras manusia.

### **Krisis Pangan dalam Perspektif Dependensi**

Teori dependensi merupakan teori yang muncul sebagai tanggapan terhadap teori modernisasi. Teori ini muncul karena didasari fakta akan lambatnya pembangunan pada negara dunia ketiga (negara

berkembang), khususnya Amerika Latin walaupun telah diberikan modal investasi dari negara kaya (Amerika Serikat). Permodalan dari negara kaya ternyata tidak mampu memberikan keuntungan bagi negara dunia ketiga, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, namun justru menambah kemiskinan di wilayah tersebut. Teori dependensi mengajukan sebuah solusi bagi negara berkembang untuk sebaiknya melepaskan diri dari hegemoni negara pusat yang memberikan modal selama ini. Jika tidak, hal ini hanya akan membuat keuntungan bagi negara maju dan tidak menguntungkan bagi wilayah *periphery*. Wilayah *periphery*, dalam kasus ini adalah negara-negara Amerika Latin yang mengalami hal sebaliknya (Margaretha 2009).

Salah satu negara *periphery* adalah Venezuela yang menganut sistem sosialis. Perkembangan negara-negara di Amerika Latin termasuk Venezuela, merupakan kebangkitan sosialisme yang dicanangkan oleh negara-negara Amerika Latin yang awalnya lahir dari isu kemiskinan dan ketidakadilan sistem ekonomi yang kapitalistik. Perekonomian liberal yang diterapkan oleh lembaga moneter internasional di negara-negara di Amerika Latin yang menempatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi selama ratusan tahun di negara-negara Amerika Latin telah mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara itu (Margaretha 2009). Dampak yang dirasakan hampir di seluruh Amerika Latin adalah kemiskinan yang semakin meningkat karena perekonomian liberal menyamaratakan penerapannya tanpa melihat kesiapan suatu negara dalam menghadapinya. Sistem ini hanya didasarkan pada ambisi Amerika Serikat sehingga sistem ini gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat dan yang tersisa untuk Amerika Latin adalah eksploitasi dan hutang yang semakin terakumulasi.

Hugo Chavez adalah presiden Venezuela ke-53 yang awalnya memimpin Revolusi Bolivarian. Hugo Chavez juga mendirikan Gerakan Republik Kelima, sebuah organisasi yang mempromosikan bentuk sosialis demokratis. Presiden Hugo Chavez melakukan serangkaian tindakan yang bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi yang tidak bergantung dengan peran Amerika Serikat dalam perkembangannya. Serangkaian tindakan itu diantaranya adalah perombakan undang-undang, nasionalisasi aset vital, dan penolakan terhadap pasar bebas di Amerika (Margaretha 2009).

Michael Lebowitz menyatakan bahwa pembangunan yang sedang gencar di Venezuela pada dasarnya bertumpu pada tiga aspek (Lebowitz, dalam Burhan 2011). Pertama, pembangunan manusia (*human development*). Pembangunan manusia yang dilakukan oleh Venezuela berkaitan dengan usaha meningkatkan produksi pangan yang dikemas dalam kebijakan Kedaulatan Pangan melalui kerjasama bilateral dengan Tiongkok. Pemerintahan Chavez mengirim petani-petani untuk bersekolah di universitas-universitas terkemuka di Tiongkok. Kedua, pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Dalam hal tersebut, khususnya kebutuhan pangan melalui kebijakan Kedaulatan Pangan yang bertujuan untuk menghindari ketergantungan terhadap produk impor, maka pemerintah mengucurkan dana sekitar kurang dari setengah milyar bolivar pada tahun 1998 hingga 20 milyar bolivar pada tahun 2009. Program ini juga berhasil mengurangi angka malnutrisi dari 60 persen menjadi 21 persen pada periode yang sama. Selain itu, Chavez juga menasionalisasi perusahaan Agroislena milik Spanyol yang menyediakan bahan-bahan pertanian. Ketiga, kepemilikan sosial dan pengambilan kebijakan berbasis partisipasi dalam komunitas dan tempat kerja. Sayangnya, negara-negara maju mengendalikan pangan dunia lewat penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini membuat keuntungan hanya pada negara maju (Burhan 2011).

Pengenalan monokultur secara besar-besaran di negara-negara berkembang oleh negara maju melalui Revolusi Hijau dipelopori International Centre for Wheat and Maize Improvement di Meksiko dan Lembaga Penelitian Padi Internasional-International Rice Reserach Institute (IRRI) di Filipina yang dikendalikan Consultative Group on International Agricultural Research yang didirikan Bank Dunia tahun 1970 (Shiva 1994, dalam Sibuea t.t). Sejak itu, ketergantungan negara berkembang pada bahan kimia dan benih produk negara maju tak terhindarkan lagi. Demi kepentingan bisnis segelintir korporasi di bidang bioteknologi, benih hasil rekayasa genetic-genetically modified organism (GMO) juga dipaksakan ke petani negara-negara berkembang. Negara berkembang seharusnya mempunyai model pembangunan sendiri untuk melaksanakan dan mencapai pembangunan yang mandiri dan terbebas dari ketergantungan. Teori dependensi muncul karena negara pinggiran mengalami banyak kerugian akibat keterkaitannya dengan negara maju. Kesuksesan penerapan teori ini tidak lepas dari peran dan partisipasi masyarakat negara berkembang dalam melakukan

revolusi sosial. Pembangunan dalam suatu negara sewajarnya terjadi secara bertahap. Sehingga negara yang melepaskan diri dari ketergantungan, tidak mungkin melepaskan diri sepenuhnya. Oleh karena itu negara-negara tersebut masih membutuhkan kerjasama regional yang saling menguntungkan dengan negara lain (Shiva 1994, dalam Sibuea t.t).

### **Krisis Pangan dalam Perspektif Gender (*Women in Development*)**

Dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan pembangunan pertanian dan pedesaan, aspek pengarusutamaan gender memegang peranan penting, khususnya pembangunan pertanian. Pengabaian bidang pembangunan pertanian akan menimbulkan konsekuensi yang serius terkait dengan kehilangan produksi dan pendapatan rumah tangga pertanian. Begitu pula dengan tingginya tingkat kemiskinan, malnutrisi, dan kerawanan pangan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya panduan kebijakan yang berbasis gender. Kendala spesifik gender terkait dengan pembangunan pertanian diantaranya adalah keterbatasan partisipasi dan akses wanita terhadap sumber daya produktif, pasar kredit dan diskriminasi tingkat upah. Hal-hal tersebut dapat membatasi potensi perannya dalam revitalisasi pertanian sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan (Byrlee & de Janvry 2008).

Kebijakan strategis dan program pengarusutamaan gender dalam mendorong optimalisasi serta percepatan pembangunan dan pertumbuhan pertanian yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah kesetaraan gender; akses pasar dan penyuluhan publik; pendidikan dan pelatihan untuk akses kesempatan kerja bagi tenaga kerja wanita; eliminasi regulasi diskriminatif yang menghambat peran wanita; serta promosi peran wanita dalam organisasi publik dan swasta di sektor pertanian. Di sisi lain, utusan Khusus PBB tentang hak atas pangan, Olivier De Schutter dalam laporannya tentang Gender dan Hak atas Pangan pada Badan Hak Asasi Manusia PBB, 4 Maret 2013 di Jenewa mengatakan berbagi kekuasaan dengan perempuan adalah jalan pintas untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi, dan merupakan langkah paling efektif untuk mewujudkan hak atas pangan. Pertanian keluarga telah menjadi feminin secara bertahap, karena laki-laki yang sering bergerak menjauh dari pertanian untuk mencari pekerjaan. Sedangkan



perempuan yang semakin menghadapi beban pertanian (Schutter, dalam Zulkifli 2014).

Menurut FAO, sekitar 925 juta penduduk mengalami kekurangan gizi di seluruh dunia pada 2011. Berdasarkan data dari FAO Focus (19/03/2009) yang dilansir oleh World Health Organization (WHO), dilaporkan bahwa perempuan memproduksi 60 persen sampai 80 persen pangan di sebagian besar negara-negara berkembang dan bertanggung jawab pada sebagian produksi pangan dunia. Dari populasi sebesar itu, ternyata angka penduduk perempuan mendominasi (51 persen) (fao.org 2010). Melihat kenyataan tersebut, maka peran perempuan harus ditingkatkan dengan menambah produktivitasnya dalam menentukan bahan pangan yang tidak hanya berkualitas untuk kesehatan tetapi juga kecermatan memilih makanan yang memenuhi standar gizi. Schutter (dalam Zulkifli 2014) menyerukan penghapusan semua hukum diskriminatif dan praktik yang menghalangi perempuan mengakses sumber daya pertanian seperti lahan, input dan kredit. Schutter (dalam Zulkifli 2014) menyerukan agar perempuan terbebas dari beban tanggung jawab perawatan di rumah melalui penyediaan layanan publik yang memadai seperti perawatan anak, air dan listrik. Tugas-tugas seperti mengambil air dan merawat kaum muda dan orang tua berjumlah setara dengan sekitar 15 persen dari PDB di negara berpendapatan menengah dan sebanyak 35 persen di negara berpenghasilan rendah. Sehingga apabila tugas yang diemban perempuan ini lebih dimaksimalkan dalam sektor yang lebih baik maka akan meningkatkan produktivitas, khususnya dalam hal ketahanan pangan dan peran perempuan (fao.org 2010).

Perempuan harus bertindak lebih kreatif dalam meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang mengarah pada kesulitan mengakses bahan pangan, khususnya ketersediaan makanan bergizi. Solusinya adalah melibatkan perempuan dalam banyak bidang, sehingga meskipun terjadi ketimpangan gender, perempuan mampu mencari nafkah dan mengurus rumah tangga, serta menyediakan bahan pangan yang lebih ramah lingkungan. Dalam hal ini, terlihat bahwa perempuan memiliki peran yang penting. Misalnya, peran perempuan dalam ketahanan pangan, gizi dan kesehatan keluarga. Dalam hal ini, seorang perempuan mengambil keputusan untuk memilih bahan pangan, mengolahnya secara sehat, dan memilih kebutuhan rumah tangga yang ramah lingkungan. Oleh sebab itu,

pengetahuan tentang bahan pangan sehat dan memenuhi kebutuhan gizi, cara pengolahannya dan kebutuhan rumah tangga yang ramah lingkungan menjadi penting untuk dimiliki setiap perempuan Indonesia (Siagian 2005).

Kerawanan pangan terjadi manakala rumah tangga, masyarakat, atau daerah tertentu mengalami ketidakcukupan pangan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi pertumbuhan dan kesehatan individu (Suryana 2004). Akibat dari kerawanan pangan adalah menurunnya status gizi dan kesehatan masyarakat, yang dapat dilihat dari tingginya prevalensi kurang gizi pada balita. Analisis data SUSENAS tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 5 juta balita (27,5 persen) menderita kurang gizi. Dari jumlah tersebut 1,5 juta (8,3 persen) menderita gizi buruk. Selain itu, kerawanan gizi juga ditandai oleh rendahnya konsumsi energi dan protein (defisit energi dan protein). Saat ini hampir 50 persen keluarga mengalami defisit energi dan protein (konsumsi rata-rata energi per kapita, masing-masing, lebih kecil dari 2200 kkal/hari dan 50 gram/hari) (Siagian 2005). Berdasarkan perkiraan FAO, perempuan menghasilkan lebih dari 50 persen produk pangan dunia (fao.org 1995).

Kawasan sub-Sahara Afrika, sebanyak 60 persen sampai 80 persen perempuan bekerja baik pada produksi pangan untuk rumah tangga maupun untuk dijual (fao.org 1995). Di Asia, perempuan menghasilkan kurang lebih 50 persen dari produksi pangan total wilayah ini. Selanjutnya, untuk wilayah Amerika Latin dan Karibia, sekitar 25 persen sampai 55 persen perempuan bekerja di sub sektor produksi pangan (Karl 1996). Perempuan melakukan sebagian besar dari pekerjaan mengolah dan menyiapkan makanan pada tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian besar. Kesalahan dalam proses pengolahan dan penyiapan pangan pada tingkat rumah tangga akan menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas gizi pangan, sehingga pada akhirnya menurunkan ketahanan pangan. Maka dari itu, terdapat urgensi untuk mencapai kesetaraan gender, sehingga terdapat maksimalisasi peran perempuan dalam ketahanan pangan. Upaya-upaya yang mendukung dan mengarah pada kesetaraan gender diantaranya seperti yang diungkapkan oleh United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) mengartikan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) sebagai:

a comprehensive strategy that involves both women-oriented programming and the integration of women/gender issues into overall existing programmes, throughout the programme cycle

(UNESCO 2003)

Dengan adanya kesadaran akan kesetaraan ini, maka peningkatan sumber daya manusia akan semakin nyata dan tidak mustahil bahwa efektivitas untuk mencegah kerawanan pangan dapat teratasi serta mampu meningkatkan kualitas SDM dan negara.

### **Kesimpulan**

Ketahanan dan krisis pangan dapat didekati dalam tiga perspektif, yaitu Malthusian, dependensi, dan gender. Perspektif Malthusian melihat bahwa solusi untuk mengatasi krisis pangan adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Teori dependensi berasumsi bahwa dalam mengatasi krisis pangan diperlukan pemutusan ketergantungan pada hegemoni pusat terhadap negara *periphery*. Perspektif gender melihat bahwa kurangnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi faktor dalam terjadinya krisis pangan. Perempuan harus semakin dilibatkan dalam pemberdayaan sumber daya, meningkatkan kesadaran politik perempuan dalam rangka melek pangan. Peran perempuan penting untuk menyelamatkan generasi penerus sebagai bagian dalam globalisasi yang rentan terhadap ketahanan dan kerawanan pangan. Akses untuk perempuan harus diperluas sehingga peran perempuan bisa lebih nyata dalam menyatukan aspek rumah tangga, politik, sumber daya, dan nilai-nilai sosial. Karenanya, *gender equality* harus dimaknai sebagai suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerja sama antara perempuan dan lelaki, bukan upaya menyamakan perempuan dengan lelaki. Kesetaraan gender tidak hanya dilihat secara sempit sebatas isu perempuan saja, melainkan isu yang juga memerlukan kerja sama antara perempuan dengan lelaki atas dasar kesetaraan hak, kesejahteraan bersama, dan penghargaan terhadap kemanusiaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Barichello, Rick, 2000. *Evaluating Government Policy for Food Security: Indonesia*. Berlin: University of British Columbia.
- Byrlee, D. and A. de Janvry, 2008. *Agricultural & Rural Development: Contributing to International Cooperation*. Rural Development Department of The World Bank. Washington DC: University of California at Berkeley.
- Maxwell, S. and Slater, R., 2003. *Food Policy Old and New*. Development Policy Review. Vol. 21(5-6). hal. 531-553.
- Scherrer, Christoph dan Debulal Saha. 2013. *The Food Crisis: Implications for Labor* Vol. 2, Mering: Rainer Hampp Verlag.
- Syarief, Hidayat, Hardinsyah dan Sumali, 1999. *Membenahi Konsep Ketahanan Pangan Indonesia*. Thaha, Hardinsyah dan Ala (Editor). Pembangunan Gizi dan Pangan Dari Perspektif Kemandirian Lokal. Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia dan Center For Regional Resource Development & Community Empowenment. Bogor.
- Zulkifli, Arif, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Salemba.

### Jurnal Ilmiah

- Siagian, Albiner, 2005. *Peranan Perempuan dalam Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*, dalam [<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15329/ikm-des2005-%20%2815%29.pdf;jsessionid=A4BDC06AB5AAD428EB920BC7845781E2?sequence=1>], hal.242-246 (akses tanggal 16 Februari 2014).

Sibuea, Posman, t.t. *Krisis Pangan Berlanjut* dalam [<http://binadesa.co/krisis-pangan-berlanjut/>]. (akses tanggal 16 Februari 2014)

## **Makalah**

Karl, M., 1996. *Inseparable: the Crucial Role of Women in Food Security*. Manila.

Suryana, A., 2004. *Ketahanan Pangan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII, Jakarta 17-19 Mei 2004.

## **Situs Daring**

Burhan, Z., (2011, Januari 23). *Opini : Oliver Stone, Amerika Latin, dan Indonesia*. Retrieved April 24, 2011, from Berdikari [Daring]. dalam <http://berdikarionline.com/opini/20110123/oliver-stone-amerika-latin-indonesia.html> [diakses tanggal 16 Februari 2014].

FAO, 1995. *Gender Equality and Food Security: Women's Empowerment as a Tool Against Hunger* [daring]. dalam <http://www.fao.org/wairdocs/ar259e/ar259e.pdf> [diakses tanggal 17 Februari 2014].

FAO, 2010. *FAO at Work 2010-2011: Women – key to food security* [online] dalam <http://www.fao.org/docrep/014/am719e/am719e00.pdf> [diakses tanggal 17 Februari 2014].

Margaretha, S., (2009, Desember 25). *Analisis : Bangkitnya Amerika Latin*. The Global Review : Pemandu Informasi Perkembangan Dunia [daring]. dalam [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=1106&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1106&type=4) [diakses tanggal 16 Februari 2014]